



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

JALAN IR. SOEKARNO NOMOR 3, DESA PATUNO,
KECAMATAN WANGI-WANGI, KABUPATEN WAKATOBİ, SULAWESI TENGGARA
SURAT ELEKTRONİK : lptk.wakatobi@gmail.com KOTAK POS : 93791

SURAT PENGANTAR

Nomor : 268 /BRSDMKP-LPTK/TU.210/IV/2023

Yth.Kepala Pusat Riset Kelautan
Jl.Pasir Putih II Ancol Timur Jakarta

Dengan ini kami kirimkan :

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2023 LPTK	1 (satu) laporan	Dikirim dengan Hormat untuk menjadi bahan sebagaimana mestinya.-

Wakatobi, 11 April 2023

Kepala Loka,



Eti Noferya M



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

JALAN IR. SOEKARNO NOMOR 3, DESA PATUNO,
KECAMATAN WANGI-WANGI, KABUPATEN WAKATOBİ, SULAWESI TENGGARA
SURAT ELEKTRONİK : lptk.wakatobi@gmail.com KOTAK POS : 93791

Wakatobi, 11 April 2023

Yth. Kepala Pusat Riset Kelautan
Jln. Pasir Putih II Ancol Timur Jakarta


TANDA TERIMA

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja (LKj) LPTK Triwulan I Tahun 2023.	Satu Laporan	Dikirim dengan Hormat untuk menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Diterima tanggal : 26 April 2023


Penerima

Nama : Joko Handono, ME
NIP : 19730609 200212 1 003
Jabatan : Subkoordinator Monitoring dan Pelaporan

Tandatangan : 

Pengirim

Nama : Amrin Hakim, S.Pi
NIP : 19691025 200212 1 004
Jabatan : Monitoring dan Evaluasi

Tandatangan : 

Mohon agar lembar Tanda Terima ini dapat dikirimkan kembali melalui email lptk.wakatobi@gmail.com

LAPORAN KINERJA

LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

Triwulan I



2023

TIM PENYUSUN :

Penanggung Jawab : Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
Ketua : Penanggungjawab Kegiatan Kepala Urusan Umum
Anggota : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
Pengelola Monitoring dan Evaluasi
Pengelola Program dan Laporan

Kegiatan Urusan Umum
Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
Alamat:

Jl. Ir. Soekarno nomor 03, Wakatobi
Sulawesi Tenggara
e-mail : lptk.wakatobi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya memberikan inspirasi dan semangat untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan ini. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan DIPA Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Wakatobi pada Triwulan I Tahun Anggaran 2021 dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan a) rencana strategis; b) perjanjian Kinerja; c) pengukuran Kinerja; d) pengelolaan data Kinerja; e) pelaporan Kinerja; dan f) reviu dan evaluasi Kinerja. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat diwujudkan.

Laporan Kinerja ini memberikan informasi kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang terukur atas capaian Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dan menjadi bahan perbaikan bagi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan tahun 2023 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dari pihak yang turut mendukung penyusunan laporan kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan ini, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya, walaupun masih terdapat kekurangan dalam penyajian dan sistematika penyusunannya. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang dilakukan.

Wakatobi, 10 April 2023

Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan,



Efi Noverya Manafi
Efi Noverya Manafi

DAFTAR ISI

	Halaman
Tim Penyusun	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	5
Ringkasan Eksekutif	6
BAB. I. PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Tujuan	7
C. Tugas dan Fungsi	7
D. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	9
E. Sistematika Laporan Kinerja	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kerja Tahun 2023	13
C. Perjanjian Kinerja (PK)	14
D. Pengukuran Kinerja	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Prestasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2023	16
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	16
C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan I Tahun 2023	23
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	26
BAB IV. PENUTUP	27
A. Capaian Kinerja Utama	27
B. Permasalahan dan Rekomendasi	27
Lampiran	28

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rencana Kerja LPTK Tahun 2023	13
Tabel 2. Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2023	14
Tabel 3. Target dan Realisasi Output LPTK Triwulan I Tahun 2023	17
Tabel 4. Capaian Kinerja IKU 4 pada Triwulan I Tahun 2023	18
Tabel 5. Capaian Kinerja IKU 8 pada Triwulan I Tahun 2023	21
Tabel 6. Capaian Kinerja IKU 9 pada Triwulan I Tahun 2023	21
Tabel 7. Pagu dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan I Tahun 2023	24
Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran per IKU Triwulan I Tahun 2023	25
Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Triwulan I Tahun 2023	25
Tabel 10. Hasil perhitungan efisiensi anggaran LPTK Triwulan I Tahun 2023	26

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	8
Gambar 2. Komposisi SDM Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	9
Gambar 3. Rincian PNS Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	9
Gambar 4. Dashboard Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	16

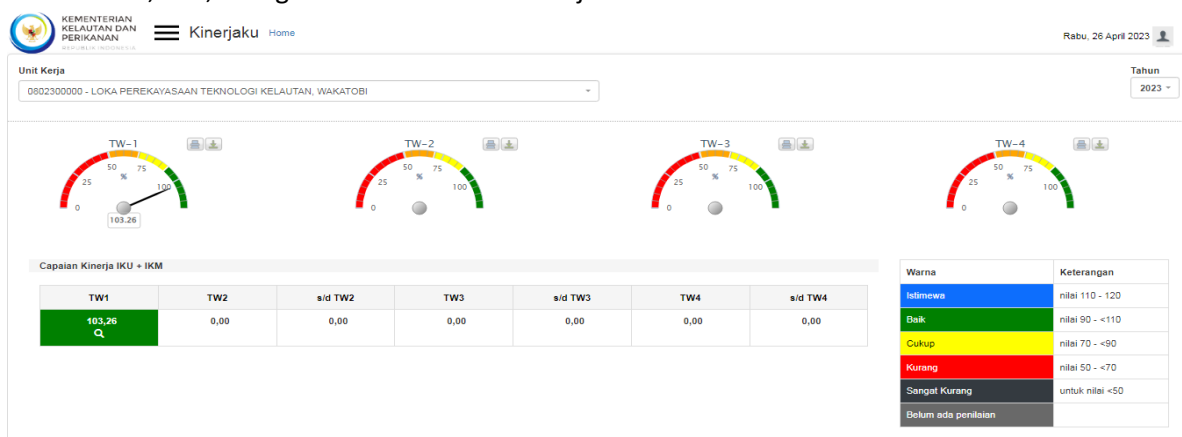
RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sebagai institusi riset di bawah BRSDM KP, LPTK bertugas melakukan perekayasaan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. LPTK berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan program kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.40/Men/2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/Permen-KP/2020 yaitu : a) penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta laporan dibidang perekayasaan teknologi kelautan; b) pelaksanaan perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; c) pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama perekayasaan teknologi kelautan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan d) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pada Triwulan I Tahun 2023, LPTK memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Strategis dan 12 Indikator Kinerja Utama sedangkan pada tahun 2022 memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 3 Sasaran Strategis dan 11 Indikator Kinerja Utama. Dari 12 IKU LPTK tersebut, terdapat 3 IKU yang target triwulannya telah tercapai dengan kinerja baik yang ditunjukkan dengan capaian indikator berstatus hijau. Rincian target dan realisasi dari 3 IKU tersebut adalah: **IKU 4)** Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK target 100% capaian Triwulan I 100%; **IKU 9)** Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK target 92% capaian 100%; dan **IKU 10)** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan target 75% capaian 75%. Untuk indikator lainnya akan diukur pada triwulan berikutnya. Pengukuran capaian kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator/KPI*) pada masing-masing perspektif.

Terdapat 1 Indikator Kinerja Utama dengan capaian melampaui target tahunannya, yaitu **IKU 9)** Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (108,70%). Terhadap capaian atas indikator ini diharapkan tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya.

Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 103,26%, sebagaimana dashboard kinerja berikut:



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden (PERPRES) No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan : a) rencana strategis; b) perjanjian kinerja; c) pengukuran kinerja; d. pengelolaan data kinerja; e) pelaporan kinerja; dan f) revaluasi dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat terwujud.

B. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan I Tahun 2023.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi satuan kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas dan Fungsi

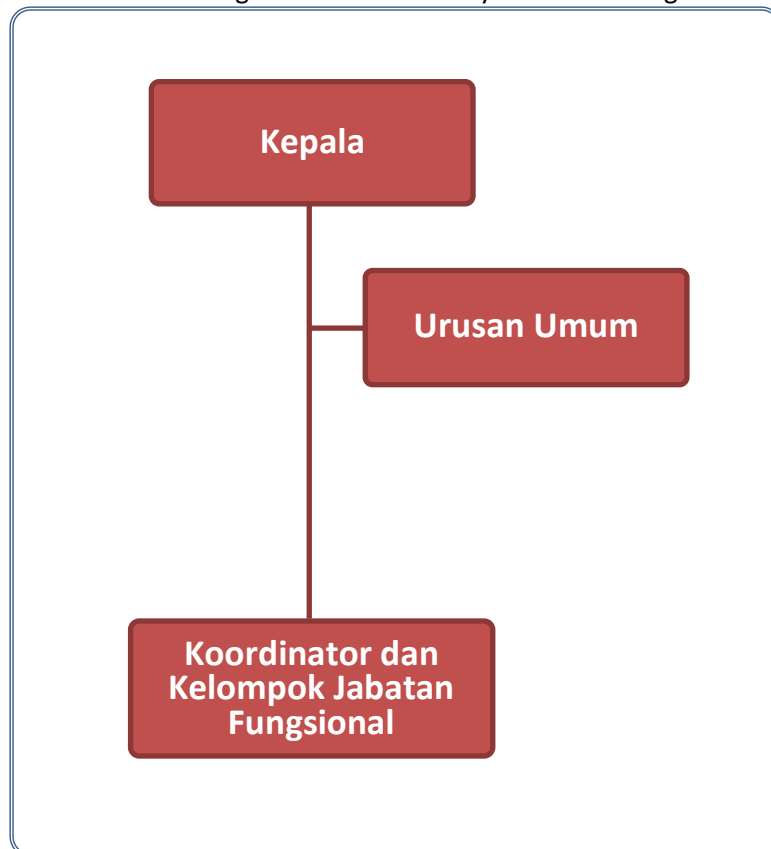
Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, yang selanjutnya disebut LPTK, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Kelautan (PRK) – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). LPTK memiliki tugas melakukan perekayasaan teknologi kelautan dalam rangka mendukung visi BRSDM KP, yakni sebagai Inovator IPTEK dan Motivator Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

Kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sebagai institusi riset dibawah BRSDM KP, LPTK bertugas melakukan perekayasaan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. LPTK berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan program kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.40/Men/2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/Permen-KP/2020 yaitu: a) penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta laporan dibidang perekayasaan teknologi kelautan; b) pelaksanaan perekayasaan teknologi kelautan di

bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; c) pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama perekayasaan teknologi kelautan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan d) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

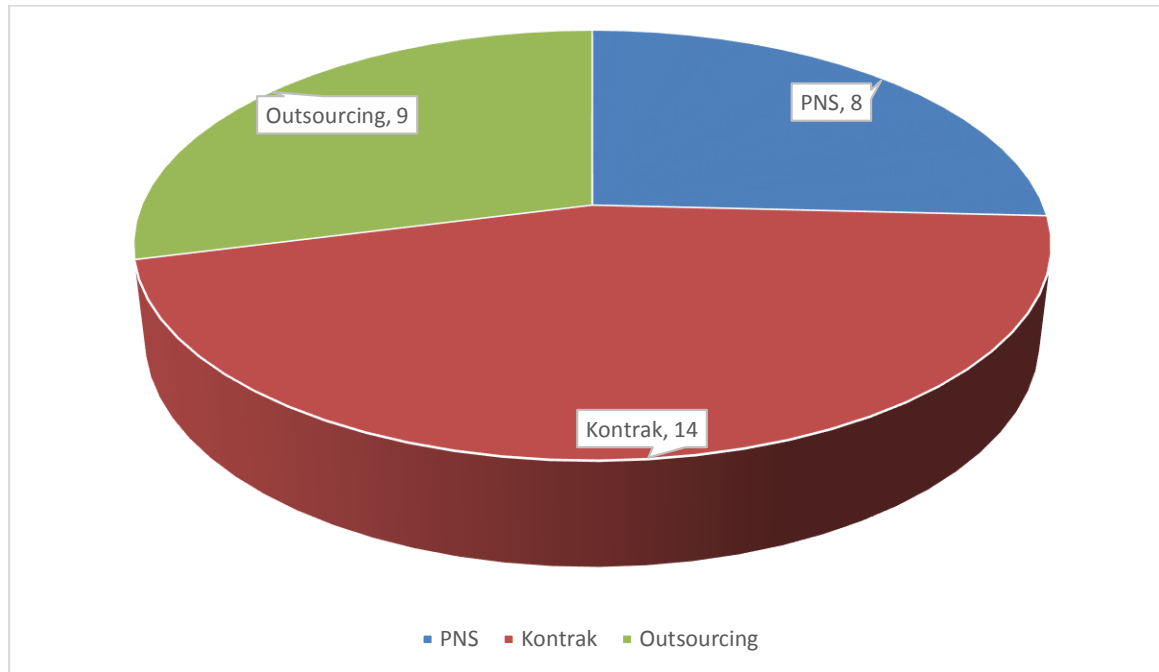
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LPTK dibantu oleh unit kerja dibawahnya yang terdiri dari: a) Urusan Umum; b) Koordinator; dan c) Kelompok Jabatan Fungsional. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

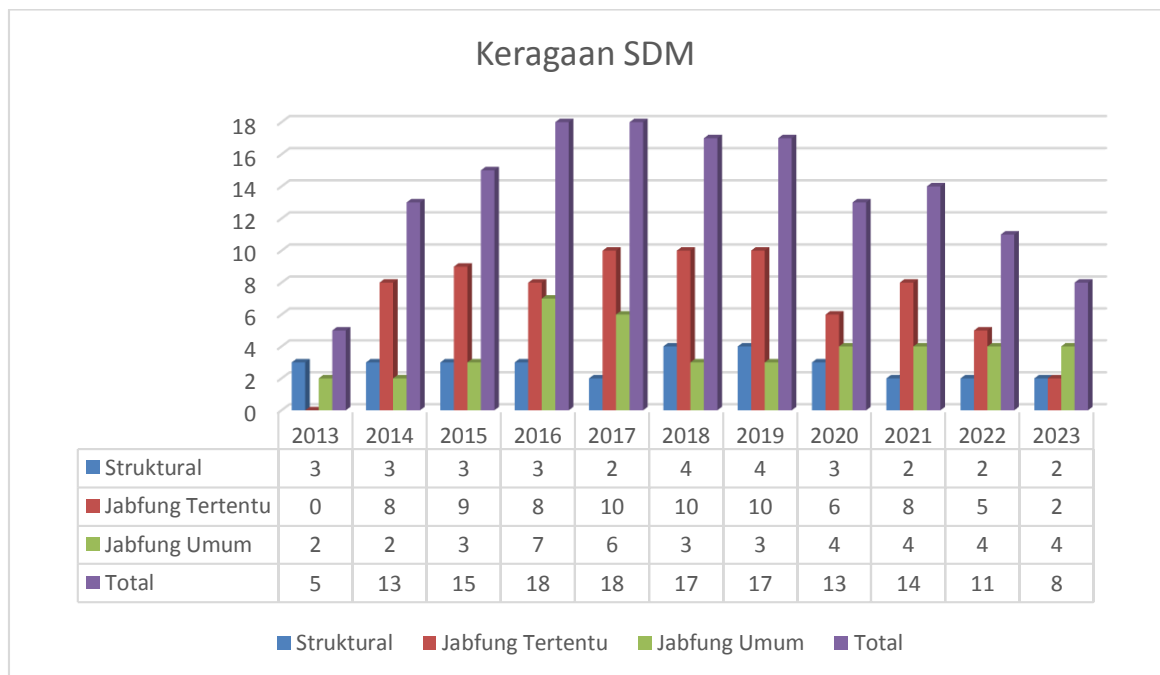


D. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai LPTK sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang terdiri dari PNS sebanyak 8 (delapan) orang, pegawai kontrak sebanyak 14 (lima belas) orang dan Outsourcing sebanyak 9 (sembilan) Orang. Komposisi SDM LPTK dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Komposisi SDM Loka Perencanaan Teknologi Kelautan



Gambar 3. Rincian PNS Loka Perencanaan Teknologi Kelautan

E. Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

- 1) **Ringkasan Eksekutif**, Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan I tahun 2023.
- 2) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang LPTK seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LPTK.
- 3) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis LPTK 2019 – 2024, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan kinerja LPTK Tahun 2023 serta Pengukuran Kinerja.
- 4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
- 5) **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.

BAB II

PERENCANAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Loka Perencanaan Teknologi Kelautan (LPTK) tahun 2020 – 2024, mengacu pada Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) dan Pusat Riset Kelautan (Pusriskel). Visi BRSDM KP dan Pusriskel pada tahun 2020 – 2024 adalah mendukung visi KKP untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi BRSDM KP dan Pusriskel menjadi penting dengan keberadaan LPTK sebagai UPT pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan LPTK yaitu mendukung visi dan misi BRSDM KP dan Pusriskel melalui kegiatan perencanaan teknologi kelautan.

Peran strategis LPTK meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil perencanaan teknologi kelautan; 2) menyelenggarakan perencanaan teknologi kelautan yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan perencanaan teknologi kelautan inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil perencanaan teknologi kelautan; 6) mewujudkan tata kelola perencanaan yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 7) Meningkatkan kontribusi PNB (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil perencanaan teknologi kelautan. Berdasarkan hal tersebut, LPTK melakukan penyusunan Renstra 2020 – 2024, untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pusriskel, BRSDM KP dan KKP serta sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 yaitu mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

1. Visi

Visi LPTK pada tahun 2020 – 2024 adalah mendukung visi Pusriskel, BRSDM dan KKP yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

2. Misi

Misi LPTK adalah menjalankan misi Presiden, KKP, BRSDM dan Pusriskel dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, LPTK mendukung 4 (empat) misi yang merupakan modifikasi dari misi yang diemban oleh KKP, BRSDM dan Pusriskel. Modifikasi dilakukan dengan penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh LPTK, yaitu :

1. Misi ke-1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan.
2. Misi ke-2: Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan terhadap Perekonomian Nasional melalui Hasil Riset Kelautan.
3. Misi ke-4: Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan.
4. Misi ke-8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Riset Kelautan.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi LPTK, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut.

- a) Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- b) Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- c) Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
- d) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Sasaran Strategis

LPTK telah menetapkan 2 sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2020 – 2024, setiap sasaran strategis memiliki satuan ukur pencapaian yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah **“Hasil Riset dan Inovasi yang dimanfaatkan”**, dengan indikator kinerja:

- Hasil riset kelautan yang dimanfaatkan oleh masyarakat/sector industri pada tahun 2020 1 paket menjadi 7 hingga tahun 2024.
- Prototipe alat dan mesin hasil riset inovasi teknologi kelautan pada tahun 2020 1 paket menjadi 8 paket hingga tahun 2024.
- Karya Tulis Ilmiah riset kelautan yang dipublikasikan 5 KTI pada tahun 2020, target total capaian KTI sampai dengan tahun 2024 adalah 28 buah KTI yang diterbitkan.
- Jejaring dan/atau kerjasama riset kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti pada tahun 2020 sebanyak 2 dokumen menjadi 15 dokumen hingga tahun 2024.
- Unit kerja riset kelautan yang ditingkatkan sarana dan prasarannya 1 unit pada tahun 2020 menjadi 3 unit hingga tahun 2024.

Sasaran strategis ke dua (SS-2) **“Tatakelola pemerintahan yang baik”** dengan indikator kinerja:

- Indeks Profesionalisme ASN LPTK bernilai 72 hingga tahun 2024.
- Unit kerja LPTK yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar, pada tahun 2020 sebesar 82%.
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK adalah Baik (88) pada tahun 2020 sampai tahun 2024.
- Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK dibandingkan realisasi anggaran sebesar 1% setiap tahunnya dari 2020 sampai 2024.
- Nilai Kinerja Anggaran LPTK pada tahun 2020 sebesar 85 sampai tahun 2024

5. Potensi dan Permasalahan

a) Potensi

Keberadaan SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset. Dengan SDM yang dimiliki serta gedung mekatronika kelautan dan Laboratorium Simlan kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan

pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta.

b) Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi diantaranya :

- Belum Finalnya OTK LPTK yang disertai tugas dan fungsi yang baru
- Minimnya SDM LPTK yang saat ini tinggal 8 (delapan) orang PNS khususnya jabatan fungsional yang akan mendukung tugas LPTK kedepan.

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) maka tiap tahun ditetapkan Rencana Kerja (Renja). Dokumen rencana kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan rincian kegiatan:

No.	Jenis output	Target	Pagu Anggaran
1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	1	100.000.000
2	Layanan BMN	1	20.000.000
3	Layanan Hubungan Masyarakat	1	25.000.000
4	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	35.000.000
5	Layanan Umum	1	75.000.000
6	Layanan Data dan Informasi	1	20.000.000
7	Layanan Perkantoran	1	4.072.499.000
8	Layanan Manajemen SDM	11	20.000.000
9	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	50.000.000
10	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	25.000.000
11	Layanan Manajemen Keuangan	1	75.000.000
12	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	15.000.000

Tabel 1. Rencana Kerja LPTK Tahun 2023

Anggaran pelaksanaan kegiatan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2023, terdiri dari Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan, Layanan BMN, Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, Layanan Perkantoran, Layanan Manajemen SDM, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dengan total pagu sebesar **Rp. 4.532.499.000,-**

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka dibuat Perjanjian Kinerja LPTK tahun 2023 yang telah menerapkan/menggunakan manajemen kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi para penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan tugas.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Kepala Pusat Riset Kelautan dilakukan pada bulan Januari 2023 terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dan 12 (duabelas) Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LPTK (unit)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	2	Nilai PNBPK LPTK (Rupiah Juta)	3,3
		3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK dibandingkan Realisasi Anggaran LPTK TA 2022 (%)	≤0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	78
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	75
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	92
		9	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (%)	92
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		11	Nilai IKPA LPTK (nilai)	89
		12	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82

D. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja tahun 2023 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja LPTK pada tahun 2023 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat website: <http://kinerjaku.kkp.go.id/app/> Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).

No	Validitas IKU	Bobot
1	Lead input	0,1
2	Lead proses	0,2
3	Lag output	0,3
4	Lag outcome	0,4

NPSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu Sasaran Strategis (SS). Status capaian SS yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU terhadap SS tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU. Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Baik	Sedang	Buruk
Indeks Capaian > 100 %	Indeks Capaian = 100%	Indeks Capaian < 100 %

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NPSS sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

KLASIFIKASI			STATUS NPSS (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
X < 100%	X > 100%	X > 100% atau X < 100%	Buruk
X = 100%	X = 100%	-	Sedang
X ≥ 100%	X ≤ 100%	X = 100%	Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah : Maximize adalah Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

2. Metode Pengukuran Kinerja

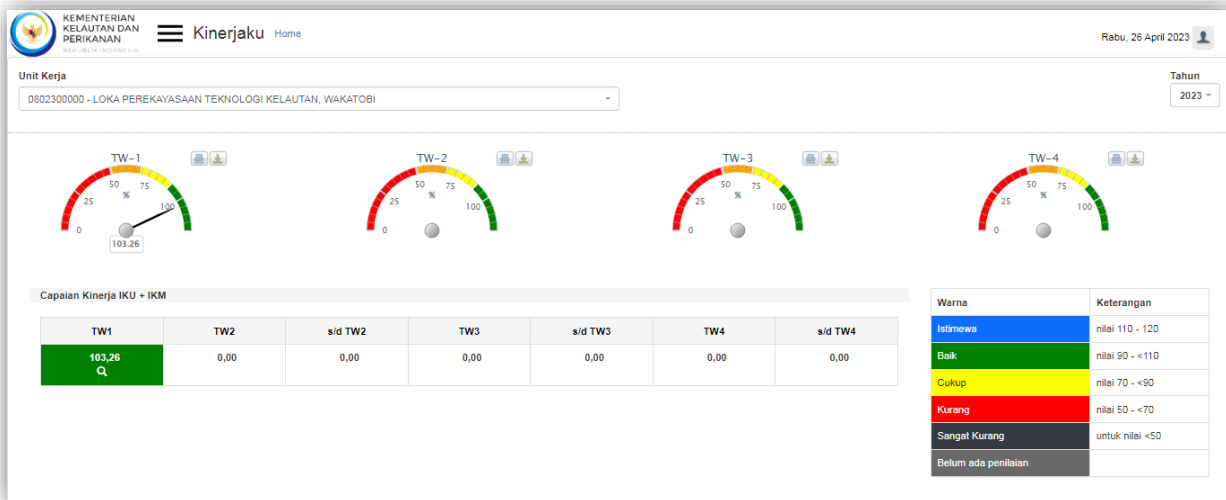
Metode pengukuran kinerja lingkup LPTK dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dikumpulkan data dukung capaiannya dari penanggungjawab masing-masing kegiatan untuk kemudian dilaporkan hasilnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Prestasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2023

Pencatatan dan Pengukuran capaian kinerja LPTK tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK Triwulan I tahun 2023 sebesar 103,26%, sebagaimana dashboard kinerja sebagai berikut:



Gambar 4. Dashboar Kinerjaku LPTK

Selama Triwulan I tahun 2023, dari 12 IKU LPTK, terdapat 3 IKU telah mencapai target triwulan yang ditetapkan, dengan kinerja baik yang ditunjukkan dengan capaian indikator berstatus hijau. Rincian target dan realisasi dari 3 IKU tersebut adalah: IKU 4) Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (100%); IKU 9) Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LPTK (108.70%); dan IKU 10) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (100,00%). Untuk indikator lain akan diukur pada triwulan berikutnya.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LPTK. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja pada Triwulan I

Tahun 2023 dapat tercapai. Capaian indikator kinerja utama pada masing – masing sasaran strategis sampai dengan Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Target dan Realisasi Output LPTK Triwulan I Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2022	TRIWULAN I		%
				T	R	
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LPTK (unit)	1			
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	2 Nilai PNBK LPTK (Rupiah Juta)	3,3			
		3 Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1			
		4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100	100	100	100,00
		5 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK dibandingkan Realisasi Anggaran LPTK TA 2022 (%)	< 0,5			
		6 Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	78			
		7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	75			
		8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	92			
		9 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (%)	92	92	100	108,70
		10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100,00
		11 Nilai IKPA LPTK (nilai)	89			
		12 Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82			

SS 1 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU sebagai berikut :

IKU 1 : Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LPTK (unit)

Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LPTK meliputi; pengadaan alat pengolah data. Bukti capaian IKU ini adalah laporan kegiatan pengadaan barang/jasa serta Berita acara serah terima pengadaan barang/jasa.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2023.

SS 2 : Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Perencanaan Teknologi Kelautan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 11 (sebelas) IKU sebagai berikut :

IKU 2 : Nilai PNBP LPTK (Rupiah Juta)

Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2023.

IKU 3 : Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)

Kerjasama adalah penyelenggaraan kerja sama antara LPTK dengan pihak mitra pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sedangkan Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama, Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2023.

IKU 4 : Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK (persen)

Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK meliputi Layanan BMN, Pelayanan Kehumasan Riset Kelautan, Layanan organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, Layanan Perkantoran, dan Penyelenggaraan Kearsipan Riset Kelautan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja IKU 4 pada Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target		Capaian		Target		Capaian
	Tahun 2022	Triwulan I 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	
Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK	100	100	100	100	100	100	

IKU ini tercapai 100% pada Triwulan I 2023 dan bila dibandingkan dengan tahun 2022 IKU ini juga tercapai 100% pada triwulan I 2022. Bukti capaian IKU ini adalah dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal LPTK berupa 7 (tujuh) laporan triwulan, yaitu : Layanan BMN 1 Laporan, Pelayanan Kehumasan Riset Kelautan 1 Laporan, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1 Laporan, Layanan Umum 1 Laporan, Layanan Data dan Informasi 1 Laporan, Layanan Perkantoran 1 Laporan, dan Penyelenggaraan Kearsipan Riset Kelautan : 1 Laporan.

IKU 5 : Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK dibandingkan Realisasi Anggaran LPTK TA 2022 (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. IKU ini menggunakan klasifikasi minimize, dimana capaian yang diharapkan adalah lebih rendah dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2023.

IKU 6 : Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)

Indikator ini merupakan IKU baru dan dihitung berdasarkan:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatir Sipil Negara.

Formulasi IKU ini terdiri dari 4 komponen dengan bobot sebagai berikut :

1. Kualifikasi (25%), meliputi pendidikan terkini pegawai dengan ketentuan sesuai SK pangkat terakhir atau SK pencantuman gelar yang sudah di update pada aplikasi SIMPEG online KKP.
2. Kompetensi (40%), meliputi kompetensi pegawai yang mengikuti diklat baik dari Diklatpim, ataupun diklat fungsional yang sudah di update pada aplikasi SIMPEG online KKP.
3. Kinerja (30%), meliputi penilaian prestasi kerja online KKP dan dikolaborasikan dengan database kepegawaian.
4. Disiplin (5%), meliputi disiplin pegawai yang diambil baik dari yang pernah/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang telah di update pada aplikasi SIMPEG online KKP.

Bukti capaian berdasarkan Tangkapan layar Nilai IP ASN LPTK dari laman --> <http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon>

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan II tahun 2023

IKU 7 : Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)

Nilai PM SAKIP LPTK dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP LPTK merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP.

Bukti capaian IKU ini berupa Surat penyampaian nilai PM SAKIP dari Sekretariat BRSDM

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2023

IKU 8 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK.

Penghitungan nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Kepatuhan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan meliputi PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Rencana Aksi, LKj/LCK Triwulan I s.d Triwulan III; Aspek Kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data; Aspek Ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada Triwulan II, II dan III pada aplikasi kinerjaku sehingga diperoleh nilai rekon kinerja dari skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi kinerja.

Bukti capaian IKU ini berupa Kertas Kerja Rekonsiliasi Kinerja yang ditandatangani oleh Pembahas dan pimpinan satker

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2023

IKU 9 : Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (%)

Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan, dimana dapat dihitung berdasarkan rumus berikut: Nilai MP = Keikutsertaan pegawai + Keaktifan + Jumlah dokumen MP yang di upload
Bobot :

Keikutsertaan pegawai = 10%

Keaktifan = 70%

Jumlah dokumen MP yang di upload = 20%

Tabel 5. Capaian Kinerja IKU 8 pada Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target		Capaian Tahun 2022	Target		Capaian Triwulan I 2023
	Tahun 2022	Triwulan I 2022		Tahun 2023	Triwulan I 2023	
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LPTK (Persen)	86	86	100	92	92	100

IKU ini telah tercapai 100% pada Triwulan I 2023, target IKU ini meningkat bila dibandingkan dengan target tahun 2022 di triwulan yang sama yakni 86. Tercapainya IKU ini salah satunya karena peran aktif para pejabat struktural dalam membagi informasi pada bitrix24 sebagai sarana manajemen pengetahuan di BRSDMKP. Bukti capaian IKU ini adalah Surat Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan Nomor : B.366/BRSDM.2/TU.140/IV/2023 tanggal 3 April 2023 yang merupakan nilai rata – rata dari Triwulan I.

IKU 10 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada LPTK berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan I Tahun 2019 s.d. Triwulan I Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BRSDM yang menjadi objek pengawasan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja IKU 9 pada Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target		Capaian Tahun 2022	Target		Capaian Triwulan I 2023
	Tahun 2022	Triwulan I 2022		Tahun 2023	Triwulan I 2023	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LPTK yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (Persen)	70	70	100	75	75	75

IKU ini telah tercapai 100% pada Triwulan I 2023 dan bila dibandingkan dengan tahun 2021 IKU tercapai pada triwulan IV 2021. Capaian IKU ini bersumber dari Surat Plh. Sekretaris BRSDM Nomor : B.1962/BRSDM.1/HP.510/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Setba terkait Penyampaian Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023 Lingkup BRSDM KP, LPTK mendapat nilai 100% karena tidak ada temuan atau tindaklanjutnya telah tuntas. Kegiatan pendukung IKU ini adalah Pelayanan Keuangan.

IKU 11 : Nilai IKPA LPTK (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 (delapan) indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di bagi menjadi 4 (empat) antara lain : a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; b) Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ; c) Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau d) Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Untuk penghitungan nilai kinerja anggaran LPTK dengan mengacu pada DJPB, yaitu sebagai berikut :

<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ul style="list-style-type: none"> Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <p>Nilai IKPA =</p> $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobor Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}$ <p>1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif) Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik $IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{n=1}^n RRev n}{n}$	<p>2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik <p>Belanja Pegawai : $DevDIPA BPeg = \frac{ R BPeg n - RPD BPeg n }{RPD B Peg n} \times 100$</p> <p>Belanja Barang : $DevDIPA Bbar = \frac{ R BBar n - RPD BBar n }{RPD B Bar n} \times 100$</p> <p>Belanja Modal : $DevDIPA BMod = \frac{ R BMod n - RPD BMod n }{RPD B Mod n} \times 100$</p> <p>Seluruh Jenis Belanja : $DevDIPA n = \frac{ Dev DIPA BPeg + DevDIPA BBar + Dev DIPA BMod }{3}$</p>
--	---

Nilai efisiensi anggaran diambil dari nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam aplikasi monev PA dengan alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/>

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan II tahun 2023

IKU 12 : Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. IKU ini bertujuan untuk mengukur aspek implementasi dan manfaat pengelolaan anggaran LPTK dalam upaya mewujudkan peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi LPTK yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.

Nilai kinerja anggaran didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya.

Nilai efisiensi anggaran diambil dari nilai yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam aplikasi SMART DJA dengan alamat <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2023, sehingga pada Triwulan I tahun 2023 belum dapat menampilkan capaian serta analisisnya.

C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan I Tahun 2023

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003).

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut : (1) Pertanggungjawaban dana publik; (2) Penyajian tepat waktu; (3) Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. Pagu anggaran tahun 2023 yang disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Loka Perencanaan Teknologi Kelautan (LPTK) adalah sebesar Rp. 4.532.499.000,-. Capaian realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2023 sebesar Rp. 625.724.927,- atau sebesar 13.81%. Pagu dan realisasi anggaran Triwulan I tahun 2023 berdasarkan rincian output dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7. Pagu dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan I Tahun 2023

Kode Nama dan Kegiatan		Keuangan		
		Pagu	Realisasi	%
1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	100.000.000	-	0,00
2	Layanan BMN	20.000.000	-	0,00
3	Layanan Hubungan Masyarakat	25.000.000	4.650.000	18,60
4	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	35.000.000	16.440.369	46,97
5	Layanan Umum	75.000.000	23.557.800	31,41
6	Layanan Data dan Informasi	20.000.000	900.000	4,50
7	Layanan Perkantoran	4.072.499.000	467.484.512	11,48
8	Layanan Manajemen SDM	20.000.000	8.171.633	40,86
9	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	50.000.000	43.449.965	86,90
10	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	25.000.000	24.249.348	97,00
11	Layanan Manajemen Keuangan	75.000.000	35.019.293	46,69
12	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	15.000.000	1.802.007	12,01
Total		4.532.499.000	625.724.927	13,81

Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran per IKU Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama		Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LPTK (unit)	100.000.000	-	0,00
2	Nilai PNBK LPTK (Rupiah Juta)	1.500.000	-	0,00
3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	16.788.000	2.700.000	16,08
4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	4.225.711.000	512.134.688	12,12
5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK dibandingkan Realisasi Anggaran LPTK TA 2022 (%)	65.928.000	34.419.293	52,21
6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	20.000.000	8.171.633	40,86
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker LPTK (nilai)	50.000.000	43.449.965	86,90
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (Nilai)	16.180.000	16.136.216	99,73
9	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (%)	18.500.000		0,00
10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	4.572.000	-	0,00
11	Nilai IKPA LPTK (nilai)	4.500.000	600.000	
12	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	8.820.000	8.113.132	91,99
Total		4.532.499.000	625.724.927	13,81

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Triwulan I Tahun 2023

Sasaran Kinerja		Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	100.000.000	-	0,00
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	4.432.499.000	625.724.927	14,12
Total		4.532.499.000	625.724.927	13,81

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa selama Triwulan I Tahun 2021 IKU yang disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja telah diakomodir dan didukung dengan ketersediaan anggaran. Pengalokasian anggaran yang tepat dapat mendorong kinerja pencapaian output yang baik. Dalam perjalanannya tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya

Sebagai organisasi sektor publik LPTK dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. https://www.ilovepdf.com/compress_pdf

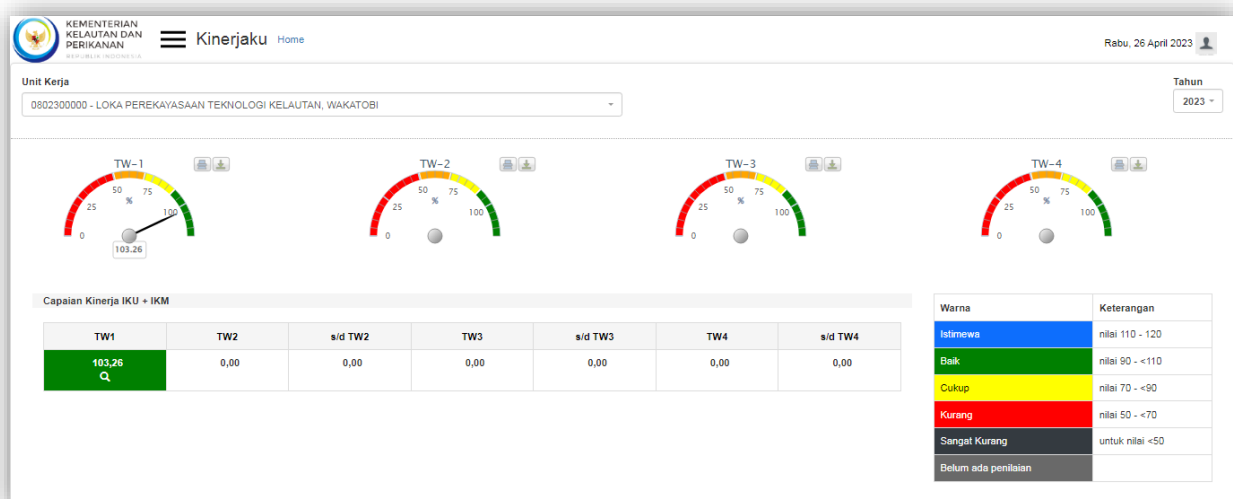
Tabel 10. Hasil perhitungan efisiensi anggaran LPTK Triwulan I Tahun 2023

Unit Kerja	Jumlah IKU	NPSS	Pagu (Rp)	Realisasi		Efisiensi Anggaran
				(Rp)	%	
LPTK	12	103,26	4.532.499.000	625.724.927	13,81	14%

BAB IV PENUTUP

A. Capaian Kinerja Utama

Pada Tahun 2023, LPTK memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Strategis dan 12 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator/KPI*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 103,26%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Dari 12 IKU LPTK tersebut, terdapat 3 IKU yang target triwulannya telah tercapai dengan kinerja baik yang ditunjukkan dengan capaian indikator berstatus hijau. Rincian target dan realisasi dari 3 IKU tersebut adalah: **IKU 4)** Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (100%); **IKU 9)** Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LPTK (108.70%); dan **IKU 10)** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (100,00%).

Terdapat 1 Indikator Kinerja Utama dengan capaian melampaui target tahunannya, yaitu **IKU 9)** Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (108,70%). Terhadap capaian atas indikator ini diharapkan tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya..

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian IKU LPTK

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Efi Noferya Manafi
Jabatan : Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yayan Hikmayani
Jabatan : PIt.Kepala Pusat Riset Kelautan

Sejaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Januari 2023

Pihak Kedua
PIt. Kepala Pusat Riset Kelautan

Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan

Efi Noferya Manafi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LPTK (unit)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	2	Nilai PNBPK LPTK (Rupiah Juta)	3,3
		3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK dibandingkan Realisasi Anggaran LPTK TA 2022 (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	78
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	75
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	92
		9	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (%)	92
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		11	Nilai IKPA LPTK (nilai)	89
		12	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	<i>Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan</i>	100.000.000
2	<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</i>	4.432.499.000
TOTAL ANGGARAN LPTK TAHUN 2023		4.532.499.000

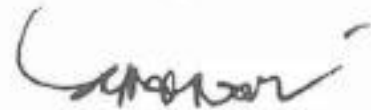
Jakarta, 18 Januari 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan



Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan



Efi Noferya Manafi